PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Senin Tanggal: 21 Agustus 2017 Halaman: 13

# Lima Raperda Ditangguhkan

## ● Tak Memungkinkan Dibahas

**YOGYA, TRIBUN** - Lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dari eksekutif ditangguhkan secara teknis dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2017. Penangguhan lima raperda ini lantaran secara teknis tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pembahasan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti menjelaskan, lima raperda yang didrop tersebut belum masuk dalam pembahasan Bapemperda. Lima raperda yang ditangguhkan ini ditangguhkan lantaran secara teknis tidak mungkin lagi ditindaklanjuti.

● ke halaman 14

## *Lima Raperda Ditangguhkan*

● Sambungan **Hal 13**

"Lima raperda yang ditangguhkan ini merupakan insiatif dari eksekutif," kata Bambang Anjar, Minggu (20/8).

Lima raperda yang ditangguhkan ini di antaranya adalah raperda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, raperda pengelolaan barang milik daerah, raperda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dan raperda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, serta raperda izin usaha jasa konstruksi.

Politisi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, untuk raperda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran masih menuai ganjalan. Hambatannya berupa fasilitasi raperda pengelolaan kebarakan yang hingga saat ini belum turun di Pemda DIY.

Padahal, kedua raperda ini saling terkait satu sama lain. Pasalnya, jika fasilitasi raperda pengelolaan kebakaran belum turun, maka retribusi pemeliharaan alat kebakaran pun belum bsa dibahas. Termasuk, pihak DPRD juga belum mengetahui adanya revisi atau tidaknya terkait dengan hasil fasilitasinya.

Adapun untuk raperda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal eksekutif, masih dinilai belum efektif. Selain terkait dinas baru, secara sumber daya manusia belum siap, sehingga tidak terlalu mendesak.

Meski lima raperda ditangguhkan, dua raperda baru dari eksekutif ditambahkan dalam Propemperda 2017, yakni raperda pencabutan perda nomor 2 tahun 2015 tentang izin gangguan (HO) dan raperda perubahan perda retribusi perizinan tertentu.

"Dari keterangan eksekutif, dua raperda tambahan itu telah siap. Karena sifatnya hanya perubahan dan pencabutan Perda, maka kedua raperda itu tidak mewajibkan menggunakan naskah akademik," ujarnya.

Sementara, untuk raperda inisiatif dari dewan sebenarnya ada yang ditangguhkan karena tidak memungkinkan secara waktu. Namun, pada akhirnya, pimpinan dewan, memutuskan semua raperda inisiatif dewan tidak ada yang ditangguhkan.

"Termasuk raperda ekonomi kreatif yang ditolak Pemprov DIY tetap akan dilanjutkan untuk diselesaikan," ujarnya.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko tetap optimistis fungsi legislasi akan berjalan optimal meski hingga akhir tahun nanti yang menyisakan hari efektif masuk kantor sekitar 23 hari saja. Pihaknya pun sudah membuat nota khusus bagi pansus agar mengutamakan produktivitas.

Menurutnya, capaian hingga bulan Agustus ini memang belum maksimal karena berbagai kendala. Salah satunya adalah tak sedikit naskah raperda usulan eksekutif baru diserahkan ke dewan pada semester dua. Lamanya waktu fasilitasi di Biro Hukum Pemprov DIY juga menjadi penyebab pembahasan raperda sedikit tersendat.

"Sesuai Permendagri 80/2015, kata dia, fasilitasi oleh Biro Hukum Pemda DIY dibatasi 15 hari. Tapi kenyataannya sering hingga berbulan-bulan baru selesai," paparnya. **(ais)**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1. Bagian Hukum | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**
NIP. 19690723 199603 1 005